



VST and Partners

Advocates & Legal Consultants

Professional, Trust and Integrity



Tower 88 Kasablanka lantai 9 unit A Jln. Casablanca Raya Kav.
88, Jakarta Selatan



vst.lawfirm@gmail.com



Senin - Sabtu 09:00-17:00



021-28541720

VIKTOR SANTOSO TANDIASA



Sebagai Managing Partners pada Law Firm VST and Partners dengan pengalaman dalam penanganan perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011, dan Perkara sengketa Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2019-2024 sebagai kuasa hukum KPU RI, Serta di PTUN sejak Tahun 2018. VST and Partners menangani perkara dengan analisis yang tajam, menawarkan berbagai langkah upaya serta Strategi dan

terobosan yang terukur, kajian komprehensif berbasis pengalaman dan didukung dengan penanganan perkara secara profesional berintegritas dan terpercaya.

Berbagai Pengalaman dalam menangani perkara Pengujian Undang-Undang, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, PTUN sebagai Kuasa Hukum KPU RI dan KPU Provinsi, membuat VST and Partners memiliki keunggulan dalam memahami Proses penanganan, tahapan/hukum acara dan Penguasaan Regulasi yang komprehensif.



PENANGANAN PERKARA DIKABULKAN TAHUN 2012 - 2024

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- **Perkara Nomor 4/PUU-X/2012 (DIKABULKAN)**
Pengujian UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Terhadap UUD 1945
- **Perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 (DIKABULKAN)**
Pengujian UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No.18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Terhadap UUD 1945
- **Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 (DIKABULKAN)**
Pengujian UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap UUD 1945
- **Perkara Nomor 31/PUU-XIII/2015 (DIKABULKAN)**
Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap UUD 1945
- **Perkara Nomor 60/PUU-XIII/2015 (DIKABULKAN)**
Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945

- **Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018 (DIKABULKAN)**
UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap UUD 1945
- **Perkara Nomor 42/PUU-XIV/2016 (DIKABULKAN)**
Pengujian UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap UUD 1945
- **Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 (DIKABULKAN)**
Pengujian UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Terhadap UUD 1945.
- **Perkara Nomor 83/PUUXVII/2019 (PIHAK TERKAIT)**
Pengujian UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Terhadap UUD 1945.
'Menjadi Pihak Terkait Kontra Pemohon (Permohonan Pihak terkait Kontra PEMOHON Dikabulkan)'
- **Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 (DIKABULKAN)**
Pengujian UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Terhadap UUD 1945.
- **Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (DIKABULKAN)**
Pengujian Formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap UUD 1945.
- **Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 (DIKABULKAN)**
Pengujian UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap UUD 1945.



- **PERKARA NOMOR 26/PUU-XXI/2023 (DIKABULKAN)**
Pengujian UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Terhadap UUD 1945.
- **PERKARA NOMOR 132-PS/PUU-XXII/2024 (DIKABULKAN)**
Pengujian UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- **Perkara Nomor 32/PUU-XXIII/2025 (DIKABULKAN)**
Pengujian Materiil UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
- **Perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025 (DIKABULKAN)**
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- **Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 (DIKABULKAN)**
Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI MAHKAMAH AGUNG RI

- **Perkara Nomor 20 P/HUM/2017 (DIKABULKAN)**
Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang
- **Perkara Nomor 4 P/HUM/2023 (DIKABULKAN)**
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 50 Tahun 2017 terhadap UU HAM, UU Kesehatan



GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- **Nomor 346/G/TF/2023/PTUN.JKT (DIKABULKAN)**
- **Nomor 316/B/TF/2024/PT.TUN.JKT (DIKABULKAN)**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- **No. 87/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pihak Terkait) - (Dismisal)**
Menangani Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Morowali Utara di Mahkamah Konstitusi dengan Kemenangan Dismisal.
- **No. 109/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pihak Terkait) - (Dismisal)**
Menangani Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Banggai Kepulauan di Mahkamah Konstitusi dengan kemenangan Dismisal.
- **No. 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pihak Terkait) - (Dismisal)**
Menangani Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Boven Digoel di Mahkamah Konstitusi dengan kemenangan Dismisal.
- **No. 330/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pihak Terkait) - (Dismisal)**
Menangani Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Boven Digoel di Mahkamah Konstitusi dengan kemenangan Dismisal.



PENGALAMAN PENANGANAN PERKARA

- Tim Kuasa Hukum Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pengujian UU LPS di Mahkamah Konstitusi
- Tim Kuasa Hukum Wakil Presiden Drs. H. Jusuf Kalla dalam Pengujian UU Pemilu sebagai Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi
- Tim Kuasa Hukum Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam Pengujian UU MD3 di Mahkamah Konstitusi
- Koordinator Tim Kuasa Hukum PT. Bongka Nova Energi dalam Proses Mediasi dalam Proses Mediasi di Kementerian Hukum dan HAM
- Koordinator Tim Kuasa Hukum Walhi dan Bupati Buol dalam Proses Mediasi di Kementerian Hukum dan HAM
- Koordinator Tim Kuasa Hukum Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI pada Kamar Tata Usaha Negara - Dr. Teguh Satya Bhakti, M.H. dalam Pengujian UU Pengadilan Pajak di Mahkamah Konstitusi
- Koordinator Tim Kuasa Hukum Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara dkk dalam Pengujian UU BPK di Mahkamah Konstitusi
- Koordinator Tim Kuasa Hukum Migrant Care dan Serikat Buruh Migrant Indonesia dalam Pengujian UU PPMI sebagai Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi
- Koordinator Tim Kuasa Hukum Human Rights Watch (HRW) sebagai Pihak Terkait di Mahkamah Agung
- Tim Kuasa Hukum KPU RI dalam Penanganan Pemilu Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi
- Tim Kuasa Hukum KPU Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2020 dalam Perkara PHPU.D di Mahkamah Konstitusi
- Koordinator Tim Kuasa Hukum Uji Formil Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi
- Koordinator Tim Kuasa Hukum Para Purnawirawan Jenderal TNI di Mahkamah Konstitusi
- Kuasa Hukum Para Jaksa Fungsional (Gol. IV/c, IV/d) Kejaksaan Agung RI di Mahkamah Konstitusi
- Konsultan Hukum Greenpeace Indonesia Periode Tahun 2022



PENGALAMAN PENANGANAN PERKARA

- Tim Kuasa Hukum KPU RI dalam Penanganan di Badan Pengawas Pemilu RI Tahun 2022
- Kordinator Tim Kuasa Hukum Pengacara Pajak dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Pajak di Mahkamah Konstitusi
- Tim Kuasa Hukum Bupati Mimika Johannes Rettob dalam Pengujian UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi dan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
- Kuasa Hukum Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI dalam Pengujian UU TNI di Mahkamah Konstitusi
- Tim Kuasa Hukum KPU RI dalam Penanganan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi
- Kuasa Hukum Para Jaksa Fungsional (Gol. IV/c, IV/d) Kejaksaan Agung RI Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
- Tim Kuasa hukum Anggota DPR RI periode 2019-2024 (H. M. Idirs Laena) dalam sengketa Pemilihan Legislatif di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024
- Kuasa Hukum Dokter-Dokter dalam Pengujian Peraturan Konsil Kedokteran di Mahkamah Agung
- Kuasa Hukum Pensiunan Lintas Angkatan Kementerian Luar Negeri di dalam Pengujian UU Perbendaharaan Negara di Mahkamah Konstitusi dan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
- Kuasa Hukum Wakil Jaksa Agung (Ketua Umum Persatuan Jaksa Indoensia) dalam Pengujian UU Kejaksaan sebagai Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi
- Kuasa Hukum Jaksa-Jaksa pada Kejaksaan Agung RI dalam Pengujian UU Ekstradisi dan UU MLA di Mahkamah Konstitusi
- Kuasa Hukum Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) dalam Pengujian UU Pers di Mahkamah Konstitusi



PENGALAMAN PENANGANAN PERKARA

- Menjadi Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagai Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 87/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- Menjadi Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagai Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 109/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- Menjadi Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagai Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 - 330/PHPU.BUP-XXIII/2025.



VST & PARTNERS

Penanganan Perkara Uji Formil UU Cipta Kerja

KANAL

LIPUTAN 6

HEADLINE HARI INI na Lim, Bakal Dimiskinkan?

Home > News > Rajut

Pertama Kali Kabulkan Uji Formil, MK Sebut UU Ciptaker Cacat

Mahkamah memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 26 Nov 2021, 00:03 WIB

kumparanNEWS

Hamdan Zoelva soal UU Cipta Kerja: Pertama dalam Sejarah MK Kabulkan Uji Formil

kumparanNEWS
26 November 2021 11:26 WIB · waktu baca 3 menit



Dr. Hamdan Zoelva (27/08/2018). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

BERITA

UU Cipta Kerja Dituding Jadikan Pendidikan sebagai Ladang Bisnis

Jumat, 13 November 2020 | 11:40 WIB

Video Cetak Dibaca: 14595484



Kuasa Hukum Pemohon Victor Santoso Tandiasa menjelaskan pokok permohonannya secara virtual dalam sidang perdana pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, Kamis (12/11) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/lfa.



VST & PARTNERS

Penanganan Perkara Para Jaksa Senior Seluruh Indonesia di Mahkamah Konstitusi

detiknews Home Berita Jabodetabek Internasional Hukum detikX Kolom Blak Blakan

MK: Batas Usia Pensiun Jaksa 60 Tahun Berlaku 5 Tahun Lagi

Yulida Medistiara - detikNews

Selasa, 20 Des 2022 14:31 WIB

Hakim MK (Grandyos Zafna/detikcom)

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan pemohon terkait usia pensiun jaksa terkait **UU Nomor 11/2021** tentang Kejaksaan. MK menetapkan pemberlakuan UU Nomor 11/2021, khususnya pasal yang mengatur batas usia pensiun **jaksa 60 tahun**, akan berlaku 5 tahun lagi sejak dibacakan.

VINFAST



VST & PARTNERS

Memindahkan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung RI Melalui Pengujian Undang-Undang

BERITA

Menguji Konstitusionalitas Aturan Pembinaan Organisasi pada Pengadilan Pajak

Senin, 27 Maret 2023 | 14:56 WIB Cetak Dibaca: 14595762



Pemohon Nurhidayat dan Kuasa Hukumnya Viktor Santoso Tandiasa mengikuti sidang perdana uji Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Senin (27/3/2023) di Ruang Sidang Panel MK. Foto Humas/ifa

BERITA

Pembinaan Organisasi Pengadilan Pajak di Bawah Mahkamah Agung

Kamis, 25 Mei 2023 | 17:27 WIB Cetak Dibaca: 14596416



Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Kamis (25/05) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/ifa

detiknews Home Berita Jabodetabek Internasional Hukum detikX Kolom Blak Blak

detikNews > Berita

Tok! MK Geser Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 25 Mei 2023 15:27 WIB



Gedung Pridadi Praptosuhardjo, Kementerian Keuangan (Ari/detikcom)

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menggeser kewenangan pembinaan dan organisasi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). MK memberikan waktu maksimal hingga 31 Desember 2026.



VST & PARTNERS

Menjadi Kuasa Hukum Kababinkum TNI di Mahkamah Konstitusi



VST & PARTNERS

*Menjadi Kuasa Hukum Persatuan Jaksa Indonesia
di Mahkamah Konstitusi*



VST & PARTNERS

*Menjadi Kuasa Hukum Ikatan Wartawan Hukum
di Mahkamah Konstitusi*



VST & PARTNERS

Firma Hukum yang berpengalaman menangani Perkara Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi

01

Tim Kuasa Hukum KPU Republik Indonesia Tahun 2024 dalam Perkara PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi



02

Tim Kuasa Hukum Pemohon dalam Perkara PHPU Legislatif Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi

03

Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait Bupati Morowali Utara (Tengah) dan Bupati Banggai Kepulauan (Kanan) dalam Perkara Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi



04

Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dalam Perkara Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi

VST & PARTNERS

*Firma Hukum yang berpengalaman menangani Perkara Sengketa
Perselisihan Hasil Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi*

Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dalam Pilkada
tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi



VST & PARTNERS

Menjadi Narasumber di Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Sumbangsih Pemikiran



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 585/RB.04/04/2024
Hal : Permohonan Narasumber

Jakarta, 13 April 2024

Kepada Yth.

Bapak Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Kantor VST & Partners

Tower 88 Kasablanka Lantai 9 Unit A

Jln. Casablanca Raya Kav. 88

Jakarta Selatan

Sehubungan dengan Forum Konsultasi Publik dalam rangka monitoring dan evaluasi pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, mohon kesediaan Bapak hadir sebagai narasumber, pada:



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2147/HK.07/10/2023

Jakarta, 19 Oktober 2023

Lampiran: 1 (satu) lembar

Hal : Permohonan Narasumber FGD

Yth. Bapak Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
di tempat.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI akan menyelenggarakan kegiatan FGD Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023. Sehubungan hal tersebut, mohon kesediaan Bapak untuk hadir sebagai narasumber pada Sesi II: "Dinamika dan Tantangan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 perihal "Kekuatan Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan Ketentuan Cedera Janji dalam Jaminan Fidusia" pada:



VST & PARTNERS

Menjadi Narasumber di Mahkamah Konstitusi
dalam Memberikan Sumbangsih Pemikiran

 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor : 1522/DK.06.00/12/2025 08 Desember 2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Narasumber

Yth. Bapak Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
di tempat

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning** yang akan diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025 secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Schubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menghadiri kegiatan Peluncuran Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC) dan menjadi narasumber *Focus Group Discussion* Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* dimaksud, pada:
hari, tanggal : Jumat, 12 Desember 2025
waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai
tempat : Aula Grha 3 Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor – Jawa Barat
tema : Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor : 1384/PP.07/11/2025 20 November 2025
Lampiran : dua berkas
Hal : Undangan menjadi Narasumber
Kegiatan *Focus Group Discussion*

Yth. Ketua Umum Perhimpunan Pengacara Konstitusi
Bapak Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka merealisasikan program Prioritas Nasional dari Bappenas untuk penyusunan naskah kajian kewenangan pengaduan konstitusional Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Islam Indonesia (PSHK UII) akan menyelenggarakan kegiatan **Focus Group Discussion (FGD) "Gagasan Kewenangan Pengaduan Konstitusional dan Desain Kelembagaannya di Mahkamah Konstitusi"** guna memperkaya substansi naskah kajian yang sedang disusun.


Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk hadir secara daring (online) melalui platform zoom sebagai **narasumber** kegiatan FGD yang akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Sabtu, 29 November 2025
Waktu : Pukul 08:30 WIB – selesai (*tentative agenda terlampir*)
Tautan Zoom : <https://zoom.us/j/91428927156?pwd=U1I0b0Y1H4O16CvVbzZg4UfikBmaYdk.1>
meeting ID : 914 2892 7156 password : 754336
Tautan Kehadiran : <https://s.id/pesertaFGDCC>



VST & PARTNERS

*Menjadi Narasumber di Mahkamah Konstitusi
dalam Memberikan Sumbangsih Pemikiran*

	
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id	
Nomor : B/ 81102/PW.10.03/12/2025	11 Desember 2025
Sifat : Biasa	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Hal : Permohonan Menjadi Narasumber	
Yth. Viktor Santoso Tandiasa. S. H., M. H. Advokat dan Konsultan Hukum	
Tower 88 Kasablanka lantai 9 unit A Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	
Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dukungan keahlian kepada DPR RI, khususnya pada penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan simulasi pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:	
hari, tanggal : Senin, 15 Desember 2025	
waktu : Pukul 14.30 WIB - selesai	
acara : FGD "Simulasi Pembuktian dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi"	
tempat : Hotel Artotel Jl. Pintu Satu Senayan No.1 1, RT. 1/RW.3, Gelora	

	
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id	
Nomor : B/613/PW.10.05/12/2025	1 Desember 2025
Sifat : Biasa	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Hal : Permohonan Menjadi Narasumber	
Yth. Bapak Viktor Santoso Tandiasa. S. H., M. H. Advokat dan legal Konsultan	
Tower 88 Kasablanka lantai 9 unit A Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	
Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dukungan keahlian kepada DPR RI, khususnya pada penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan tema "Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang di MK".	
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Bapak agar dapat hadir sebagai narasumber dalam rangka kegiatan FGD, yang akan dilaksanakan pada:	
Hari, tanggal : Rabu, 3 Desember 2025	
Waktu : Pukul 15.30 WIB-selesai	
Acara : FGD "Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Pengujian"	



*Bersama Kepala Badan
Keahlian DPR RI
Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono
dan
Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang
DPR RI*

*Bersama Kepala Badan
Keahlian DPR RI
Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono
dan
Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang
DPR RI*

*Serta
Para Ahli dan Tim Badan
Keahlian DPR RI*



KEUNGGULAN

- Memahami Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara Holistik
- Memahami secara Detail Pengurusan Perkara di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- Memiliki Strategi serta Analisis yang berbasis pada Pengalaman Praktek di Mahkamah Konstitusi sejak Tahun 2011 dan di Pengadilan Tata Usaha Negara
- Memahami Berbagai Peraturan Perundang-Undangan serta Putusan-Putusan yang terkait tentang Pengujian Undang-Undang, Kepemiluan dan Pilkada serta Sengketa Tata Usaha Negara secara Komprehensif
- Memiliki Jaringan Ahli yang Berkompeten di Mahkamah Konstitusi, PTUN, dan Bawaslu serta DKPP
- Memiliki jaringan Media Mainstream Nasional yang kuat dan khusus meliput pemberitahuan Hukum dan Kepemiluan.
- Memiliki Media Publikasi Melalui Channel Youtube dan Tiktok Konstitusionalis TV

